



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-12.05.01 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);  
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);  
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);  
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);  
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

- 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 231);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.TI.05.01 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode 2023-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan tim tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pembina;
  2. Tim Pengarah; dan
  3. Tim Koordinasi.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 (tiga) dibantu oleh kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari:
1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE;
  2. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE;
  3. Kelompok Kerja Manajemen SPBE; dan
  4. Kelompok Kerja Layanan SPBE.
- KEEMPAT : Tugas Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II sebagai Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Rapat Koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.TI.06.02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-12.05.01 TAHUN 2023

Tanggal : 12 Juni 2023

**TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Pembina
  - a. Memberikan pembinaan terhadap Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyelenggaraan SPBE di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kebijakan SPBE Nasional;
  - b. Memberikan pembinaan terhadap Tim Koordinasi agar program dan kegiatan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan kebijakan SPBE Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tim Pengarah
  - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
  - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan inovatif;
  - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
  - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
  - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
3. Tim Koordinasi
  - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
  - b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
  - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kelompok Kerja
  - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
    - 1) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 2) mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala;
  - 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 5) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - 6) membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE
- 1) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
  - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala;
  - 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 5) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - 6) membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE
- 1) melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
  - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala;
  - 4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 5) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - 6) membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Kelompok Kerja Layanan SPBE

- 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala;
- 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nomor : M.HH-12.05.01 TAHUN 2023  
Tanggal : 12 Juni 2023

DAFTAR TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. PEMBINA

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pembina

2. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Jenderal	Pengarah/Ketua Tim Koordinasi SPBE
2.	Inspektur Jenderal	Anggota Tim Pengarah
3.	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Anggota Tim Pengarah
4.	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota Tim Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pemasarakatan	Anggota Tim Pengarah
6.	Direktur Jenderal Imigrasi	Anggota Tim Pengarah
7.	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	Anggota Tim Pengarah
8.	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Anggota Tim Pengarah
9.	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota Tim Pengarah
10.	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota Tim Pengarah
11.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota Tim Pengarah

3. TIM KOORDINASI

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Koordinator
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota Tim Koordinasi
3.	Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Anggota Tim Koordinasi
4.	Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota Tim Koordinasi
5.	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Anggota Tim Koordinasi
6.	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi	Anggota Tim Koordinasi
7.	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Anggota Tim Koordinasi
8.	Direktur Fasilitas dan Informasi Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Anggota Tim Koordinasi
9.	Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota Tim Koordinasi

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
10.	Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota Tim Koordinasi
11.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota Tim Koordinasi

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Zulfahmi, Analis Kepegawaian Madya selaku Koordinator Standardisasi dan Kerja Sama Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Tarwo, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan TIK pada Direktorat Fasilitas dan Informasi Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Anggota
3.	Deswati, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha pada Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	I Gede Dodi Bariman, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Sistem Informasi Perundang-Undangan pada Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Setyo Purwanto, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Perencanaan pada Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Anggota
6.	Susan Sandra Indriati, Pranata Komputer Muda selaku Koordinator Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota
7.	Nova Dahliyanti, Pranata Komputer Muda selaku Subkoordinator Standardisasi dan Kerja Sama Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
8.	DS Fashih Pambudi, Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
9.	David Bezalel Anggi Syah Putra Laoli, Pengolah Data Aplikasi dan Database pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Indah Permata Ruffit, Pengelola Jaringan Dokumentasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Arie Susandra, Pranata Komputer Muda pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
12.	Migi Nurjadi Arafa, Pranata Komputer Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota



b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sunu Tedy Maranto, Kepala Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Marsono, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Febri Mujiono, Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Ferry Indrawan, Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Chusni Thamrin, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Sistem Informasi pada Pusat Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
6.	Nanank Syamsudin, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Data dan Informasi pada Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Anggota
7.	Erna Priliyasi, Analis Hukum Madya selaku Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota
8.	Haddryson, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Penelitian Hukum pada Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
9.	Anisa Siti Mukarromah, Pranata Komputer Muda selaku Subkoordinator Dukungan Teknis, Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota
10.	Nandha Adhami Prihatma, Perencana Muda selaku Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Tomy Kurniawan, Pranata Komputer Muda selaku Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
12.	Novi Mirawanty, Pranata Komputer Muda selaku Subkoordinator Perencanaan dan Standardisasi Teknologi Informasi pada Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Anggota
13.	Pramita Septiyani, Pengolah Data Aplikasi dan Database pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
14.	Astrid Febrianca, Pranata Komputer Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
15.	Muh. Fadhil Al-Haaq Ginoga, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

c. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Machyudhie, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Data dan Pengamanan Jaringan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Alkana Yudha, Arsiparis Madya selaku Koordinator Tata Usaha Kementerian pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Reza Aditiyas Ananda, Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Kepegawaian dan Tata Usaha pada Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Anna Ernita, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Lisca Presylia Walujo, Perencana Muda selaku Koordinator Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Bambang Edi Sumarno, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya selaku Koordinator Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Susi Liza Febriani, Pranata Komputer Madya selaku Penanggung Jawab Kelompok Kerja Pelaksanaan Operasional Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota
8.	Tony Ferdianto, Pranata Komputer Madya selaku Penanggung Jawab Kelompok Kerja Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota
9.	Bugie Kurniawan, Analis Keimigrasian Madya selaku Koordinator Perencanaan dan Pengembangan pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi	Anggota
10.	Slamet Iman Santoso, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
11.	Emalia Suwartika, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota
12.	Rohmayani, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi selaku Plt. Subkoordinator Kerja Sama dan Evaluasi Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
13.	Syafril Tua, Analis Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Anggota

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
14.	Puji Andreanto, Pranata Komputer Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
15.	Rifky Zulfikar Fawzi, Pengolah Data Aplikasi dan Database pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
16.	Amir Mujahiduddin, Pengolah Data Aplikasi dan Database pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
17.	I Nyoman Satria Paliwahet, Pranata Komputer Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
18.	Ekki Rizki Ramadhan, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

d. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Budhi Pratomo Mahardiko, Pranata Komputer Madya selaku Koordinator Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual pada Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Ketua
2.	Picesco Andika Tulus, Kepala Bagian Pengembangan Karir Pegawai pada Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Yessy Arverlina, Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Nur 'Ainun, Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya selaku Koordinator Penyelenggaraan pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
5.	Yus Bayu Tirto Hutomo, Analis Kepegawaian Madya selaku Koordinator Penyelenggaraan pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
6.	Bramantyo Agung Nugroho, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Abdul Rokhman, Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal	Anggota
8.	Edhi Hendrico, Pranata Komputer Muda selaku Subkoordinator Pengamanan Data dan Jaringan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
9.	Raharyo Handono, Pranata Komputer Muda selaku Subkoordinator Pemeliharaan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Rehan Parga Ali, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda selaku Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
11.	Satrio Wibisono, Pengolah Data Aplikasi dan Database pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
12.	Ainatul Maulida, Pengolah Data Aplikasi dan Database pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
13.	Nafia Rizky Yogayana, Pranata Komputer Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
14.	Muhammad Heindardi Yuansyah, Pranata Komputer Muda pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
15.	Purina Qurota Ayunin, Pranata Komputer Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY